

## PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SD ISLAM TERPADU BUAH HATI KABUPATEN PEMALANG

Amarin <sup>1)</sup>, Sunandar <sup>2)</sup>, Noor Miyono <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Guru di Pemalang Jawa Tengah

<sup>2)</sup> Universitas PGRI Semarang

### Abstract.

*The purpose of this research is to gain an overview of the role of the school committee in the implementation of School Based Management in Elementary School Buah Hati District of Pemalang. The focus of research is the role of the school committee in the implementation of School Based Management with sub focus the role of the school committee as a conduit of consideration, the school committee as a support, the school committee as a controller, the school committee as a mediator in Elementary School Buah Hati District of Pemalang.*

*Results showed the role of communities in School Based Management has a strategic role means that the school committee acts as a conduit of consideration in the form of ideas, input, aspirations, involvement in school programs, serve as a support in terms of funding, supporting school activities, imaging either to the surrounding community, the role of controlling which act as watchdogs of the budget in the form of reports, supervisory activities, acting as a liaison between multiple mediators that school with parents, education authorities and the public. Elementary School Buah Hati has a principle of independence, accountability, transparency, and strong partnerships that school that provides easy access to information to the school community and the public on what is being done with school by utilizing various communication channels. Constraint of the school committee in the implementation of school-based management is the lack of communication between the school and the school committee because of lack of time owned by the school committee.*

**Keywords:** *School Based Management, Elementary School*

### PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 54 menyebutkan bahwa: Ayat (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, Ayat (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodir pandangan aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut

adalah Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan (sekolah). Selanjutnya pada pasal 56 ayat 3 UU Sisdiknas menyatakan bahwa: komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Hasil studi pendahuluan peneliti menunjukkan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Buah Hati Kabupaten Pemalang. memiliki prestasi yang cukup baik, yakni sebagai juara I (satu) lomba MIPA (Matematika dan IPA) tingkat Kabupaten Tahun Pelajaran 2014/2015, dengan kelulusan mencapai 100% berdasarkan ujian nasional tahun Pelajaran 2013/2014 dengan nilai kelulusan mencapai rerata 80 untuk 3 mapel UN (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA). Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari peran yang dilakukan oleh komite sekolah serta dukungan orang tua siswa dan masyarakat. Pengambilan putusan di SD Islam Terpadu Buah Hati Pemalang di ambil berdasarkan musyawarah sekolah baik antara sekolah dengan komite sekolah, orang tua siswa maupun intern sekolah sendiri. Dengan adanya musyawarah menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Sekolah dan dukungan peran serta orang tua siswa berjalan dengan baik. Selain itu berdasarkan pengamatan sementara di SD Islam Terpadu Buah Hati Pemalang menunjukkan bahwa evaluasi dan monitoring komite sekolah telah berjalan dengan baik.

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam pengembangan sekolah dan dukungan pendanaan dapat dilihat dari sumbangan orang tua siswa yang cukup besar. Pada dasarnya sekolah dasar di kecamatan Pemalang telah digratiskan dari berbagai pungutan, namun di SD-IT Buah Hati masih menarik biaya pendidikan bagi siswa melalui SPI (Sumbangan Pengembangan Instritusi), SOP (Sumbangan Operasional Pendidikan), dana praktek siswa, iuran makan dan snack dan sumbangan sukarela oleh orang tua siswa. Masyarakat antusias untuk menyekolahkan anak mereka ke SD IT Buah Hati Pemalang, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa tahun Pelajaran 2014/2015 jumlah siswa ada 325 anak dari kelas I-VI. Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya dukungan komite sekolah dan kesadaran dari orang tua dalam memajukan pendidikan di SD-IT Buah Hati Pemalang. Peran aktif komite sekolah juga sangat terlihat dalam upaya sekolah dalam mengembangkan sekolah

jaringan islam terpadu. Komite sekolah sebagai donator pembelian tanah wakaf sekaligus turut serta dalam pembebasan lahan serta penjualan sertifikat wakaf untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jaringan Islam Terpadu kepada masyarakat. Peran serta komite tersebut menjadikan SD-IT Buah Hati memiliki jaringan pendidikan yang lebih luas.

Peran komite sekolah dilihat dari adanya POMG (Perkumpulan Orang Tua/Wali Murid) yang dibentuk di masing kelas dengan program kegiatan pertemuan rutin orangtua murid dan kegiatan sosial. Jika dibandingkan dengan sekolah dasar lain di kabupaten Pematang, kegiatan POMG hampir tidak ada dan tidak memiliki kegiatan. Namun di SD-IT Buah Hati, kegiatan POMG telah berjalan secara aktif dan lancar. Komite sekolah turut hadir dan sangat berperan dalam pertemuan rutin kegiatan tersebut. Namun demikian peran komite sekolah sebagai mediator sekolah dengan dinas terkait masih belum optimal. Sekolah cenderung melakukan pengembangan sekolah dengan swadana orang tua siswa.

Komite sekolah juga berperan aktif sebagai verifikator pertanggungjawaban program sekolah, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan laporan keuangan sekolah. Namun demikian komite sekolah tidak memiliki program kerja khusus komite dalam setahun, sehingga komite bekerja hanya dari dorongan sekolah dan program rutinitas tahun-tahun sebelumnya di sekolah.

Fokus penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD Islam Terpadu (SD IT) Buah Hati Kecamatan Pematang”. Dari fokus penelitian dirinci dalam sub fokus, peran komite sekolah sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), peran komite sekolah sebagai *supporting agency* (pendukung), peran komite sekolah sebagai *controlling agency* (pengontrol), peran komite sekolah sebagai *mediator agency* (mediator) di SD Islam Terpadu Buah Hati Kecamatan Pematang.

Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 ayat 1 dijelaskan bahwa “manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan”.

Manajemen Berbasis Sekolah yang oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional diujicobakan dalam Proyek Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2009). Melalui otonomi yang lebih besar, sekolah diharapkan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya sehingga sekolah lebih mandiri. Kemandirian sekolah akan lebih berdaya dalam mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan potensi. Begitu pula dengan pengambilan keputusan partisipatif, yaitu pelibatan warga sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan akan mengakibatkan rasa memiliki sekolah bagi masyarakat dan keluarga sekolah. Otonomi sekolah maupun pengambilan keputusan partisipatif tersebut diatas bertujuan untuk peeningkatan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Soegito, 2010: 121).

Myers dan Stonehill (2003) dalam Umaedi, Hadianto, dan Siswantari (2009: 4.3) berpandangan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap proses pendidikan, dan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan, personal, dan kurikulum sekolah.

Dari pemaparan beberapa definisi MBS seperti diatas maka disimpulkan bahwa MBS merupakan otonomi sekolah dalam mengelola semua kegiatan kependidikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu dengan tetap pada kerangka pendidikan nasional. MBS di harapkan dapat membuat sekolah lebih mandiri, dengan memberdayakan potensial sekolah melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk memulai mengambil keputusan secara partisipasif yang melibatkan semua warga sekolah.

Tujuan MBS menurut Mulyasa (2009: 13) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain: keleluasaan mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu, antara lain: partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Peningkatan pemerataan, antara lain: peningkatan partisipasi masyarakat.

Menurut Nurkolis (2003: 56), MBS memiliki 8 karakteristik, antara lain 1) sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan memberi arah kerja, 2) aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah, 3) terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen, 4) keleluasaan dan keweangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan dan sebagainya, 5) MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah, 6) MBS menekankan hubungan antarmanusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan, 7) peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator, 8) dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multitingkat dan multisegi.

Pelaksanaan MBS, sekolah memiliki mitra yang mewakili masyarakat sekitarnya yang disebut komite sekolah. Tugas dan fungsi komite sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah adalah: (1) memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (2) mendorong orangtua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan/program/ penyelenggaraan dan keluaran pendidikan (Darma, 2010: 3).

Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah telah diatur dalam suatu kelembagaan yang disebut dengan Komite Sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan sekolah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh sekolah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika sekolah tidak menangani kinerjanya dengan baikkinerjanya. Manajemen kinerja sekolah yang baik adalah titik awal dari transparansi sekolah.

Akuntabilitas MBS adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat. Akuntabilitas diukur dari: (a) sekolah mampu memonitor keterlaksanaan sosialisasi MBS kepada semua warga sekolah, (b) pertanggungjawaban sekolah atas penyelenggaraan MBS, (c) sekolah melakukan berbagai cara untuk mempertanggungjawabkan program sekolah, dan (d) sekolah melakukan berbagai cara untuk mempertanggungjawabkan keuangan/dana sekolah.

Wrihatnolo dan Dwidowijoto (2007: 2) dalam Manajemen Pemberdayaan menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang mempunyai tiga tahapan, yaitu: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 1) penyadaran dimana pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsip dasarnya adalah membuat target bahwa mereka perlu membangun "*demand for education*"(tuntutan akan pendidikan) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri

mereka bukan dari orang luar, 2) pengkapasitasan yang sering disebut “*capacity building*” atau dalam bahasa sederhana memampukan, untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu, 3) pemberian daya atau empowerment, dimana pada tahap ini diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang.

Mulyasa (2006: 32) menyatakan dalam dunia pendidikan pemberdayaan merupakan cara yang praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah, para guru dan para pegawai. Pemberdayaan dimaksud untuk memperbaiki kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif dan efisien. Pada sisi lain untuk memberdayakan sekolah harus pula ditempuh upaya-upaya memberdayakan peserta didik dan masyarakat setempat. Pemberdayaan merupakan alat untuk mengubah citra masyarakat awam terhadap pengertian salah tentang kebijakan sekolah dan para petugas sekolah, kemudian dapat memberikan informasi tentang program dan kebijakan sekolah serta menghilangkan atau mengurangi kritik-kritik tajam atau negative terhadap sekolah.

Pada tataran regulasi, pasal 56 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. “Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”. (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

Tugas utama komite sekolah ialah membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan mediator. Untuk memajukan pendidikan di sekolah, komite sekolah membantu sekolah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan pendidikan, dan mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra sekolah.

Pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, yang selanjutnya

diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 1 ayat 42. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Pada Pasal 58B juga menyebutkan bahwa komite sekolah/madrasah memberi bantuan pengarah, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah/madrasah.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Penelitian ini menggambarkan secara jelas dan sekuensial terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelum peneliti terjun ke lapangan dan mereka tidak menggunakan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam penelitian (Sukardi, 2003: 14). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang terjadi di SD-IT Buah Hati Pematang sebagai lokasi penelitian.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara dan kajian dokumen , secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subyek penelitian yang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan penelitian. Observasi juga dilakukan terhadap kegiatan diluar kelas maupun di dalam kelas, di ruangan kerja guru, kepala sekolah..Observasi juga dilakukan terhadap lingkungan sekolah.
2. Wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpinpin, sebab sekalipun wawancara dilakukan secara bebas tetapi sudah dibatasi oleh struktur pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara bebas yang dilakukan kepada informan kunci dan informan pendukung.. Setelah memperoleh data dari informan peneliti melakukan *memberchek* atau pencocokan data yang didapatkan dari beberapa sumber sehingga data lebih valid dan lebih objektif.
3. Kajian Dokumen. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan menyelidiki data-data tertulis yang ada dalam buku, majalah,

dokumen, surat-surat, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Kajian dokumen dilakukan terhadap berbagai arsip yang digunakan dalam proses manajemen sekolah, misalnya Resntra sekolah, program tahunan, rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS), Program kerja kepala sekolah rencana pembelajaran, laporan tahunan. Kajian dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang data.

Teknik yang digunakan untuk menjaga validitas data dalam penelitian adalah teknik triangulasi. Menurut Arikunto (2008: 129) Triangulasi merupakan proses memastikan sesuatu (*getting a fix*) dari berbagai sudut pandang. Sedangkan Moleong (2007: 330) mengemukakan bahwa Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

Triangulasi sumber data yaitu dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beragam sumber data, sehingga data dari satu sumber bisa teruji kebenarannya bila dibandingkan dengan data sejenis dari sumber lain yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data-data dari hasil penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (1992: 91-93) yang dilakukan dalam 3 komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data meliputi penyeleksian data melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Proses reduksi berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian sampai laporan akhir penelitian selesai disusun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Komite sekolah telah dilibatkan dalam rencana pengembangan sekolah yakni pada pembangunan masjid dan ruang kelas baru, dimana sekolah membutuhkan dukungan dari komite sekolah berkaitan dengan dukungan anggaran dari orang tua siswa. Lahan yang telah dimiliki oleh SD-IT Buah Hati Pematang merupakan bangunan yang kokoh dan baru yang berasal dari bantuan dan dana hibah pemerintah, dan swadana orang tua siswa.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan ditunjukkan dengan indikator: keterlibatan dan pertimbangan aspirasi dan gagasan, keterlibatan pada rencana pengembangan sekolah, keterlibatan rencana pembangunan gedung sekolah, kesempatan untuk memberikan pertimbangan pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), namun peran komite sekolah hanya sebatas pada pertimbangan anggaran, sedangkan pertimbangan dalam pembelajaran maupun program sekolah komite sekolah kurang berperan karena keterbatasan dalam menguasai atau memahami kurikulum sekolah.

SD-IT Buah Hati sebagai sekolah swasta yang melandaskan pengelolaan sekolah berdasarkan prinsip kemandirian dalam manajemen berbasis sekolah. SD-IT Buah Hati dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) terdapat pos penerimaan sumber keuangan sekolah yang berasal dari swadana orang tua murid selain dari pos penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penarikan dana tersebut antara lain dana Dana Penunjang Pendidikan dan Dana Kegiatan Sekolah (DPP/DKS) diantaranya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP). Peran komite sekolah memberikan dukungan dalam Penentuan jumlah besarnya SOP dengan pemberlakuan subsidi silang. SD-IT Buah Hati merupakan sekolah swadana dan swakelola dari orang tua siswa.

Peran komite sekolah sangat mendukung kegiatan sekolah demi kemajuan keberhasilan pendidikan di SD-IT Buah Hati Pematang. Dukungan tersebut dapat dilihat dari: dukungan pendanaan orang tua siswa, dukungan pengembangan mutu sekolah, komitmen bersama untuk menjadi sekolah sebagai pusat keunggulan yang mampu mengembangkan siswa menjadi generasi cerdas, mandiri dan berkarakter rabbani. Namun peran komite sekolah belum mampu memberikan dukungan dengan mencarikan dana social dari pemerintah.

Peran komite sekolah memberikan *controlling* pada program atau kegiatan visi sekolah. Salah satunya yaitu program unggulan yang diterapkan disekolah dan perwujudan 10 kompetensi kepribadian muslim anak. Pelaksanaan program di SD-IT Buah Hati Pematang berpedoman pada Al-Quran dan hadist yang dijabarkan dalam program unggulan islami dan 10 kompetensi kepribadian muslim anak yakni mempunyai aqidah yang bersih, beribadah dengan benar, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai kemandirian, berwawasan luas, mempunyai fisik yang kuat, berjiwa peluang, teratur dalam segala urusan, menghargai waktu, bermanfaat bagi orang lain. Program tersebut diimplementasikan melalui: pelaksanaan sholat dhuha jam 07.00-07.30, sholat dhuhur berjamaah, baca tulis Al-Quran, hafalan (Tahfidz) Al-Quran, hafalan hadist dan doa. Sedangkan program ekstrakurikuler antara lain: Pramuka, Renang, Mathematics Club, English Club, Sains Club, Hadroh/Duror, bengkel menulis, Pildacil, Arabic Club, Sepak Bola, Karate.

Bentuk pengawasan atau *controlling* dari komite sekolah, hanya memastikan bahwa program yang dilaksanakan terdapat kendala atau hambatan baik dari segi pendanaan maupun perijinan. Pengawasan ditunjang dengan laporan bulanan kepada komite sekolah, melalui laporan kegiatan selama satu bulan dan laporan keuangan. Pengawasan tidak serta merta selalu datang kesekolah untuk melihat pelaksanaan program, sepanjang program-program telah dilaksanakan dan tidak mengalami kendala. Pengawasan oleh komite sekolah secara secara triwulan, anjagsana kesekolah dengan pengesahan laporan.

Peran komite sekolah sebagai mediator, antara lain: menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa melalui POMG, penghubung sekolah dengan informasi/kegiatan kelurahan, penghubung antara sekolah dengan UPPK dan dinas pendidikan. Namun peran komite sekolah sebagai penghubung dengan Dinas Pendidikan masih kurang maksimal, SD-IT Buah Hati selama berdiri sampai dengan sekarang belum pernah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah dalam pembangunan gedung sekolah.

Komite sekolah menerapkan prinsip akuntabilitas dimana komite sekolah turut bertanggungjawab dan terlibat dalam perencanaan penyusunan Rencana Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) melalui otorisasi serta verifikator penyusunan program kerja dan RAPBS Sekolah. Komite sekolah menerapkan prinsip partisipasi, dimana komite sekolah mendorong komitmen warga sekolah dan orang tua siswa terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, komite sekolah menggalang dana dari orang tua siswa untuk biaya operasional sekolah dan gaji guru. Komite sekolah juga memberikan masukan tentang kebijakan dan program pendidikan yang baik untuk sekolah melalui program ekstrakurikuler, setor ayah, qiroati dan program keagamaan lainnya.

SD-IT Buah Hati memiliki prinsip kemandirian, akuntabilitas, transparansi, dan kemitraan kuat yakni sekolah yang memberikan kemudahan akses informasi kepada warga sekolah dan masyarakat terkait dengan program yang dilaksanakan sekolah dengan mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti website sekolah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Peran komite sekolah sebagai *advisory agency* ditunjukkan dengan: 1) keterlibatan penyusunan program sekolah dan memberikan pertimbangan strategi sekolah, 2) keterlibatan dalam rencana pengembangan sekolah pembelian tanah melalui pendirian SD-IT dan SMP-IT Buah Hati, 3) memberikan pertimbangan pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) sekaligus sebagai verifikator dalam program kerja sekolah.
2. Peran komite sekolah sebagai *supporting agency* ditunjukkan dengan: 1) dukungan pendanaan melalui Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) untuk pengembangan pembangunan sarana prasarana sekolah, Sumbangan Operasional Sekolah (SOP) untuk kegiatan operasional, sumbangan infak sekolah, 2) dukungan pemikiran pengembangan mutu sekolah, yakni dukungan pada pengadaan guru yang sesuai dengan kompetensi guru dan dukungan pada program intrakurikuler sekolah dan ekstrakurikuler sekolah.
3. Peran komite sekolah sebagai *controlling agency* ditunjukkan dengan: 1) pengontrol dalam pelaksanaan pembelajaran, yakni dengan memastikan bahwa program yang dilaksanakan tidak terdapat kendala atau hambatan baik dari segi pendanaan maupun perijinan, 2) pengontrol dalam penggunaan dan pelaporan keuangan sekolah melalui keikutsertaan komite sekolah dalam rapat komite yang membahas tentang penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran orang tua siswa, adanya legitimasi komite sekolah dalam laporan penggunaan dana keuangan sekolah, 4) fungsi pengawasan sarana dan prasarana, untuk melihat ketersediaan

sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah dalam proses pendidikan, sekiranya sarana dan prasarana tersebut sangat minim, maka akan menjadi rencana pengembangan sekolah tahun depan kepada komite sekolah.

4. Peran komite sekolah sebagai *mediator agency* ditunjukkan dengan: komite sekolah mampu menjadi mediator antara kepentingan sekolah dengan ketersediaan orang tua siswa, terutama dalam hal pendanaan yakni menentukan besarnya sumbangan orang tua siswa, komite sekolah turut aktif pada kegiatan yang diadakan pada POMG, adanya peran komite dalam hubungan kemitaaan dengan kelurahan, UPPK dan dinas pendidikan.

### **Saran**

1. Dinas pendidikan kabupaten Pematang : diharapkan dapat membuat regulasi dan kebijakan pemberdayaan komite sekolah di satuan pendidikan, dengan cara melibatkan komite sekolah pada legalitas program sekolah.
2. Kepala Sekolah (a) diharapkan melibatkan komite sekolah dalam perumusan program sekolah dan berperan tidak hanya pada dukungan pendanaan sekolah, juga dapat dilibatkan pada program intrakurikuler dan ekstrakurikuler (b) mengalokasikan dana sebesar 10% dari Rencana Anggaran Pendapatan sekolah (RAPBS) untuk pengembangan tendik dan non tendik sebagai upaya peningkatan mutu sekolah. (c) mengembangkan pengembangan sekolah dengan menyesuaikan perkembangan IPTEK pada proses pembelajaran, adanya program ekstrakurikuler komputer, dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah islami.
3. Guru diharapkan (a) meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dengan mengikuti penataran, diklat dan workshop guru untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan siswa yang diimbangi dengan bekal keimanan dan ketaqwaan. (b) berkolaborasi dan bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa berupa pembelajaran dan pendampingan siswa dalam pembelajaran.
4. Komite sekolah (a) hendaknya menyusun program kerja komite sekolah dengan melibatkan kepala sekolah dan dewan guru. (b) berperan aktif terhadap perencanaan program sekolah, memantau proses pembelajaran lebih intensif, menindaklanjuti program sekolah dengan evaluasi kinerja sekolah minimal sekali dalam satu semester.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, Ibrahim. 2012. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*: Jakarta: Bumi Aksara
- Darma, Surya 2010. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta.
- , 2009. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta.
- Fadjar, A. Malik. 2002. Kata Pengantar dalam Ibtisam Abu Duhou. 2002. *School-Based Management*. Penerjemah Noryamin Aini, dkk. Jakarta: Logos.
- Hasbullah, 2007. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta
- Misbah, 2009. *Peran Dan Fungsi Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. jurnal pemikiran alternative pendidikan STAIN Purwokerto Vol. 14 No.1.
- Mayarani, Selvi dan Desi Nurhikmahyanti. 2014. *Peran Komite Sekolah Dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo*. jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol. 4 No. 4
- Mulyasa, E, 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan implementasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Nur, 2012. *Langkah-langkah dalam Melaksanakan MBS*. Online://<http://nur07.blogspot.com/2012/10.4.html>
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurkolis, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, modul dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

- Rohiyat, 2010. *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik*. Bandung. PT.Refika Aditama.
- Sidi, Indra Djati. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar (Menggagas Paradigma Baru Pendidikan)*. Jakarta: Paramadina.
- Sri wardiah, Murniati, Djailani. 2015. *Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 1 Lhoknga*. jurnal administrasi pendidikan Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0156 Volume 3, No. 2.
- Sujanto, 2009. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Sukardi, 2008. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, 2006. *Pemberdayaan Komite Sekolah*, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan., diakses tanggal 22 Agustus 2009.
- Suryadi, Ace. 2003. *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah : Mewujudkan Sekolah-sekolah yang Mandiri dan Otonom*, [http : //www/depdiknas.go.id](http://www/depdiknas.go.id).
- Soegito, AT. 2010. *Kepemimpinan Manajemen Berbasis Sekolah*. Semarang: UNNES Press.
- Titisari, Hana, 2011. *Peran Keterlibatan Komita Dalam Pelaksanakan MBS di SMA 3 Semarang*. Tesis. Unnes. Semarang
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Lembaga Informasi Nasional
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah*
- Umaedi, Hadiyanto dan Siswantari, 2008. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Wrihatnolo,Randy R, Riant Nugroho Dwijowijoto, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia.